



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 dengan baik. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai penjabaran Rencana Strategis Tahun 2019-2024, dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 yang memberikan gambaran tentang program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Harapan kami Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2019 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten Kubu Raya “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya serta Memiliki Daya Saing”.

Sungai Raya, 14 Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kubu Raya

  
**MARIA AGUSTINA, SE. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197108161996032002



## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	46
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	48
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD .....	49
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	56
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	57
3.3. Program dan Kegiatan .....	59
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
1.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPSTP Tahun 2023 .....	69
BAB V. PENUTUP .....	70
DAFTAR LAMPIRAN	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2023. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Renja DPMPTSP merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJMD 2019 – 2024, RKPD KKR Tahun 2023 dan Renstra DPMPTSP 2019 – 2024, terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2023.

Penyusunan Renja DPMPTSP tahun 2023 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu :

1. Penyusunan rancangan awal Renja SKPD
2. Forum Gabungan SKPD Kabupaten Kubu Raya, arah kebijakan dan pagu indikatif tahun 2023
3. Penyusunan rancangan Akhir Renja SKPD

#### 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun



- 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);
  29. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
  30. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 61)



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja DPMPTSP adalah untuk memberikan arah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 sesuai dengan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pengendalian sinergitas program dan kegiatan di daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2023 adalah sebagai :

2. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2023;
3. Pedoman bagi DPMPTSP untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Melaksanakan arah kebijakan DPMPTSP Tahun Anggaran 2023 yaitu kemudahan berinvestasi dan memberi peluang kerja dengan adanya investasi.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

#### BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

#### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan





BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPSTP Tahun 2023

BAB V. PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka memantapkan rencana kerja tahun 2023 diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2021. Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dimaksud dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan DPMPTSP.

Berdasarkan realisasi Hasil kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada rencana kerja tahun 2021 secara garis besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan walaupun ada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, namun secara keseluruhan kinerja yang dicapai sudah baik, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 2.1  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)\*  
 Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>I. Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</b>										
	Program administrasi perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	300,00 Persen	200,00 Persen	100,00 Persen	-	-	-	200 Persen	66,67
	Penyediaan jasa surat menyurat	Lama pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat	3,00 Tahun	2,00 Tahun	1,00 Tahun	-	-	-	2 Tahun	66,67
	Penyediaan jasa komunikasi,	Lama pelaksanaan penyediaan jasa	3,00 Tahun	2,00 Tahun	1,00 Tahun	-	-	-	2 Tahun	66



	sumber daya air dan listrik	komunikasi, sumber daya air dan listrik											,6 7	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional selama 1 tahun	30,00	Unit	20,00	Unit	10,00	Unit	-	-	-	20	Unit	66 ,6 7
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	4300 & 9	Lemb ar Mate rai & Buku Cek	2350 dan 14	Lemb ar Mate rai & Buku Cek	1500 & 3	Lemb ar Mate rai & Buku Cek	-	-	-	2350 dan 14	Lemb ar Mate rai & Buku Cek	55 ,0 0
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lama pelaksanaan penyediaan jasa kebersihan kantor	3,00	Tahu n	2,00	Tahu n	1,00	Tahu n	-	-	-	2	Tahu n	66 ,6 7
	Penyediaan alat tulis kantor	Lama pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor	3,00	Tahu n	2,00	Tahu n	1,00	Tahu n	-	-	-	2	Tahu n	66 ,6 7
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lama Pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3,00	Tahu n	2,00	Tahu n	1,00	Tahu n	-	-	-	2	Tahu n	66 ,6 7
	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,00	Tahu n	2,00	Tahu n	1,00	Tahu n	-	-	-	2	Tahu n	66 ,6 7
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	2.800,00	Oran g	1.250,00	Oran g	1.000,00	Oran g	-	-	-	1250	Oran g	44 ,6 4
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	160,00	OH	66,00	OH	60,00	OH	-	-	-	66	OH	41 ,2 5



		luar daerah yang dihadiri												
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	180,00	OH	73,00	OH	60,00	OH	-	-	-	73	OH	40,56
	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya tenaga honorarium/kontrak	18,00	Orang	-	Orang	6,00	Orang	-	-	-	-	Orang	-
	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Jumlah dokumen SOP administrasi pemerintahan	3,00	Dokumen	-	Dokumen	1,00	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>300,00</b>	<b>Persen</b>	<b>200,00</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	-	-	-	<b>200</b>	<b>Persen</b>	<b>66,67</b>
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	4,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	-	-	Unit	-
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	13,00	Unit	11,00	Unit	4,00	Unit	-	-	-	11	Unit	84,62
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	34,00	Unit	22,00	Unit	8,00	Unit	-	-	-	22	Unit	64,71
	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	34,00	Buah	4,00	Buah	12,00	Buah	-	-	-	4	Buah	11,76
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3,00	Tahun	2,00	Tahun	1,00	Tahun	-	-	-	2	Tahun	66,67



	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3,00	Unit	2,00	Unit	1,00	Unit	-	-	-	2	Unit	66,67
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3,00	Tahun	2,00	Tahun	1,00	Tahun	-	-	-	2	Tahun	66,67
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala komputer	3,00	Tahun	2,00	Tahun	1,00	Tahun	-	-	-	2	Tahun	66,67
	Pemeliharaan halaman atau taman kantor	Jumlah pemeliharaan halaman atau taman kantor	3,00	Tahun	-	Tahun	1,00	Tahun	-	-	-	-	Tahun	-
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	3,00	Paket	-	Paket	1,00	Paket	-	-	-	-	Paket	-
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>persentase peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>300,00</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	150,00	Orang	-	Orang	50,00	Orang	-	-	-	-	Orang	-
	<b>Program peningkatan sumber daya aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan sumber daya aparatur</b>	<b>300,00</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan BIMTEK	18,00	Orang	10,00	Orang	6,00	Orang	-	-	-	10	Orang	55,56
	Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi jabatan SKPD	3,00	Dokumen	-	Dokumen	1,00	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-



	Penyusunan analisis jabatan SKPD	Jumlah analisis jabatan SKPD	3,00	Dokumen	-	Dokumen	1,00	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	
	Peningkatan kinerja pelayanan terpadu satu pintu	Jumlah peningkatan kinerja terpadu satu pintu	27,00	Orang	-	Orang	9,00	Orang	-	-	-	-	Orang	-	
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase dokumen pelaporan SKPD yang diselesaikan</b>	<b>300,00</b>	<b>Persen</b>	<b>200,00</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	-	-	-	-	<b>200</b>	<b>Persen</b>	<b>66,67</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	3,00	Dokumen	2,00	Dokumen	1,00	Dokumen	-	-	-	2	Dokumen	66,67	
	Penyusunan pelaporan keuangan semester	Jumlah dokumen laporan semester yang disusun	3,00	Dokumen	2,00	Dokumen	1,00	Dokumen	-	-	-	2	Dokumen	66,67	
	Penyusunan pelaporan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	3,00	Dokumen	2,00	Dokumen	1,00	Dokumen	-	-	-	2	Dokumen	66,67	
	Penyusunan rencana kerja, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen RENJA, RKA, DPA dan DPPA yang disusun	12,00	Dokumen	8,00	Dokumen	1,00	Dokumen	-	-	-	8	Dokumen	66,67	
	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungj	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungj	3,00	Dokumen	2,00	Dokumen	1,00	Dokumen	-	-	-	2	Dokumen	66,67	



	awaban (LKPJ) SKPD	aban (LKPJ) yang disusun												
	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Persentase SKPD yang Telah Melakukan Arsip Baku</b>	300	Pers en	1,00	Pers en	1,00	Pers en	-	-	-	1	Pers en	33,33
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Lama kegiatan pengarsipan	3,00	Tahu n	1,00	Tahu n	1,00	Tahu n	-	-	-	1	Tahu n	33,33
	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan</b>	300,00	Pers en	300,00	Pers en	100,00	Pers en	-	-	-	300	Pers en	100,00
	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan BIMTEK keuangan dan aset	12,00	Oran g	-	Oran g	4,00	Oran g	-	-	-	-	Oran g	-
	Fasilitasi Pengelolaan aset pada SKPD	Jumlah laporan aset SKPD	5,00	Doku men	4,00	Doku men	2,00	Doku men	-	-	-	4	Doku men	80,00
	<b>Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>	300,00	Pers en	-	Pers en	100,00	Pers en	-	-	-	-	Pers en	-
	Pemeliharaan sistem informasi terhadap layanan publik berbasis WEB	Jumlah Pemeliharaan sistem informasi eletronik yang dilaksanakan	3,00	Tahu n	-	Tahu n	1,00	Tahu n	-	-	-	-	Tahu n	-





	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>300,00</b>	<b>Pers en</b>	<b>200,00</b>	<b>Pers en</b>	<b>100,00</b>	<b>Pers en</b>	-	-	-	<b>200</b>	<b>Pers en</b>	<b>66,67</b>
	Penyusunan rencana strategis (Renstra) SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA SKPD	3,00	Dokumen	2,00	Dokumen	1,00	Dokumen	-	-	-	2	Dokumen	66,67
	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	Jumlah Dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan SKPD	6,00	Dokumen	-	Dokumen	2,00	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-
	<b>Program pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan aparatur pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah</b>	<b>300,00</b>	<b>Pers en</b>	<b>200,00</b>	<b>Pers en</b>	<b>100,00</b>	<b>Pers en</b>	-	-	-	<b>200</b>	<b>Pers en</b>	<b>66,67</b>
	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Pembelajaran di Kantor Sendiri (In House Training) yang diadakan	3,00	Kali	8,00	Kali	1,00	Kali	-	-	-	8	Kali	26,67
	Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen dan hasil survey kepuasan masyarakat	3,00	Dokumen	4,00	Dokumen	1,00	Dokumen	-	-	-	4	Dokumen	13,33
	Penyusunan standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	3,00	Dokumen	-	Dokumen	1,00	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-
	Penyusunan Database E-Formasi	Jumlah dokumen	3,00	Dokumen	-	Dokumen	1,00	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-



		Database E-Formasi												
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Jumlah dokumen SKJ	3,00	Dokumen	-	Dokumen	1,00	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-
	<b>Program peningkatan pelayanan akta perizinan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>
	Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perizinan	Jumlah fasilitasi dan sosialisasi peraturan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan	2,00	Kali	-	Kali	-	Kali	-	-	-	-	Kali	-
	Pengkajian dan pengembangan perizinan dan nonperizinan	Jumlah dokumen peraturan dan koordinasi terkait pelaksanaan pelayanan perizinan dan perizinan	1,00	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-
	Penanganan pengaduan kinerja (PTSP)	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang dilaksanakan	30,00	Pengaduan	-	Pengaduan	-	Pengaduan	-	-	-	-	Pengaduan	-
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan kebudayaan, perindustrian, perdagangan,	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	75,00	Perse	-	Perse	-	Perse	-	-	-	-	Perse	-



	koperasi dan tenaga kerja													
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan dan pariwisata	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	75,00	Perse n	-	Perse n	-	Perse n	-	-	-	-	Perse n	-
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	75,00	Perse n	-	Perse n	-	Perse n	-	-	-	-	Perse n	-
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan cipta karya, tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	75,00	Perse n	-	Perse n	-	Perse n	-	-	-	-	Perse n	-
	<b>Program peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan</b>	<b>Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Selesai</b>	<b>5.215</b>	<b>Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>2.025</b>	<b>Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>2.630</b>	<b>Perizinan dan Non Perizinan</b>	-	-	-	<b>4.655</b>	<b>Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>89,26</b>
	Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perizinan	Jumlah fasilitasi dan sosialisasi peraturan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu	4,00	Jumlah	4,00	Jumlah	2,00	Jumlah	-	-	-	4	Jumlah	10,00



		pintu yang dilaksanakan												
	Pengkajian dan pengembangan perizinan dan nonperizinan	Jumlah dokumen peraturan dan koordinasi terkait pelaksanaan pelayanan perizinan dan perizinan	2,00	Jumlah	5,00	Jumlah	1,00	Jumlah	-	-	-	5	Jumlah	250,00
	Penanganan pengaduan kinerja (PTSP)	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang dilaksanakan	60,00	Jumlah	12,00	Jumlah	30,00	Jumlah	-	-	-	12	Jumlah	20,00
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan kebudayaan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan tenaga kerja	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	75,00	Persentase	92,00	Persentase	75,00	Persentase	-	-	-	92	Persentase	122,67
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan dan pariwisata	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	75,00	Persentase	90,00	Persentase	75,00	Persentase	-	-	-	90	Persentase	120,00
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan	75,00	Persentase	86,00	Persentase	75,00	Persentase	-	-	-	86	Persentase	114,67



	lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan	yang di selesaikan												
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan cipta karya, tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	75,00	Perse ntase	89,00	Perse ntase	75,00	Perse ntase	-	-	-	89	Perse ntase	118,67
	Sistem informasi layanan publik berbasis elektronik	Jumlah sistem informasi eletronik yang di laksanakan	3,00	Aplik asi	3,00	Aplik asi	3,00	Aplik asi	-	-	-	3	Aplik asi	100,00
	Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik berbasis elektronik	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik berbasis elektronik	4,00	Doku men	2,00	Doku men	2,00	Doku men	-	-	-	2	Doku men	50,00
	<b>Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi</b>	<b>Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi</b>	<b>100,00</b>	<b>Persentase</b>	<b>-</b>	<b>Persentase</b>	<b>-</b>	<b>Persentase</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Persentase</b>	<b>-</b>
	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah promosi potensi investasi penanaman modal yang diikuti	3,00	Kali	-	Kali	-	Kali	-	-	-	-	Kali	-
	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi penanaman modal, KP3MR dan KP3MN yang dilaksanakan	4,00	Kali	-	Kali	-	Kali	-	-	-	-	Kali	-



	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan, Jumlah dokumen LKPM dan Jumlah realisasi investasi daerah	20,00	Perusahaan	-	Perusahaan	-	Perusahaan	-	-	-	-	Perusahaan	-
	<b>Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</b>	<b>Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)</b>	<b>8.125.346.888.310,71</b>	<b>Rupiah</b>	-	<b>Rupiah</b>	<b>8.125.346.888.310,71</b>	<b>Rupiah</b>	-	-	-	-	<b>Rupiah</b>	-
	Pengembangan SPIPISE dan Informasi potensi daerah	Jumlah pelayanan perizinan melalui SPIPISE yang dilaksanakan	125,00	Izin dan LKM	-	Izin dan LKM	-	Izin dan LKM	-	-	-	-	Izin dan LKM	-
	Fasilitasi dan Koordinasi kerjasama bidang Penanaman Modal	Jumlah laporan Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan KKR	1,00	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-
	Penyusunan profil investasi	Jumlah dokumen profil investasi	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-
	Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal	1,00	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-
	Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah Dokumen cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-



	Program pengelolaan dan peningkatan investasi	Realisasi investasi, jumlah perusahaan PMDN dan PMA	8.125.346.888.310,71 321 PMDN dan 19 PMA	Rupiah Proyek	12.586.377.057.463,30 233,00	Rupiah Proyek	8.125.346.888.310,71 321 PMDN dan 19 PMA	Rupiah Proyek	-	-	-	12.586.377.057.463,30 233	Rupiah Proyek	154,90 68,53
	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dilaksanakan	8,00	Kali	9,00	Kali	4,00	Kali	-	-	-	9	Kali	112,50
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen LKPM realisasi investasi daerah	60,00	Perusahaan	100,00	Perusahaan	302,00	Perusahaan	-	-	-	100	Perusahaan	166,67
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran atau expo yang diikuti	2,00	Kali	6,00	Kali	1,00	Kali	-	-	-	6	Kali	30,00
	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal	2,00	Dokumen	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	-	-	-	1	Dokumen	50,00
<b>II. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</b>														
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													



2	1	0			Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200,00	Pers en	-	Pers en	100,00	Pers en	100,00	Pers en	100,00	Pers en	200,00	Pers en	100,00	
2	1	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200,00	Pers en	-	Pers en	100,00	Pers en	100,00	Pers en	100,00	Pers en	200,00	Pers en	100,00	
2	1	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA, Rencana kerja, RKA,DPA dan DPPA	10,00	Doku men	-	Doku men	5,00	Doku men	5,00	Doku men	100,00	5,00	Doku men	10,00	Doku men	100,00
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1,00	Doku men	-	Doku men	-	Doku men	-	Doku men	-	-	Doku men	-	Doku men	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1,00	Doku men	-	Doku men	-	Doku men	-	Doku men	-	-	Doku men	-	Doku men	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1,00	Doku men	-	Doku men	-	Doku men	-	Doku men	-	-	Doku men	-	Doku men	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	1,00	Doku men	-	Doku men	-	Doku men	-	Doku men	-	-	Doku men	-	Doku men	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi	7,00	Doku men	-	Doku men	5,00	Doku men	5,00	Doku men	100,00	5,00	Doku men	10,00	Doku men	142,86





					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja DPMPSP yang Disusun														
2	1	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,00	Dokumen	-	Dokumen	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	100,00	4,00	Dokumen	8,00	Dokumen	160,00
2	1	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	200,00	Persen	-	B[ b g v -	100,00	Persen	100,00	Persen	100,00	Persen	200,00	Persen	200,00	100,00
2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	24,00	Bulan	-	Bulan	12,00	Bulan	12,00	Bulan	100,00	12,00	Bulan	24,00	Bulan	100,00
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPSP Tahun	2,00	Laporan	-	Laporan	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,00	1,00	Laporan	2,00	Laporan	100,00
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	2,00	Laporan	-	Laporan	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,00	1,00	Laporan	2,00	Laporan	100,00
2	1	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200,00	Persen	-	Persen	100,00	Persen	100,00	Persen	100,00	Persen	200,00	Persen	200,00	100,00
2	1	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100,00	Set	-	Set	50,00	Set	-	Set	-	50,00	Set	50,00	Set	50,00



					Kelengkapan nya															
2	1	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai SKPD yang di Monitoring, Evaluasi dan Dinilai (Reward ASN / SKP)	1,00	Oran g	-	Oran g	-	Oran g	-	Oran g	-	1,00	Oran g	1,00	Oran g	100,00
2	1	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pembelajaran di Kantor Sendiri(In House Training) yang Diadakan	4,00	Kali	-	Kali	2,00	Kali	2,00	Kali	100,00	2,00	Kali	4,00	Kali	100,00
2	1	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	51,00	Oran g	-	Oran g	-	Oran g	-	Oran g	-	51,00	Oran g	51,00	Oran g	100,00
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>200,00</b>	<b>Pers en</b>	<b>-</b>	<b>Pers en</b>	<b>100,00</b>	<b>Pers en</b>	<b>100,00</b>	<b>Pers en</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Pers en</b>	<b>200,00</b>	<b>Pers en</b>	<b>100,00</b>
2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,00	Unit	-	Unit	8,00	Unit	22,00	Unit	275,00	2,00	Unit	24,00	Unit	240,00
2	1	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,00	Item	-	Item	6,00	Item	6,00	Item	100,00	8,00	Item	14,00	Item	100,00
2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	9,00	Unit	9,00	Unit	100,00



2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,00	Surat Kabar	-	Surat Kabar	2,00	Surat Kabar	2,00	Surat Kabar	100,00	5,00	Surat Kabar	7,00	Surat Kabar	100,00
2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,00	bulan	-	bulan	12,00	bulan	12,00	bulan	100,00	12,00	bulan	24,00	bulan	100,00
2	1	0	2	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dihadiri	122,00	OH	-	OH	40,00	OH	130,00	OH	325,00	82,00	OH	212,00	OH	173,77
2	1	0	2	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>122</b>	<b>Unit</b>	<b>-</b>	<b>Unit</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>	<b>100,00</b>	<b>121</b>	<b>Unit</b>	<b>122</b>	<b>Unit</b>	<b>100,00</b>
2	1	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	1,00	Unit	1,00	Unit	100,00
2	1	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	6,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	6,00	Unit	6,00	Unit	100,00
2	1	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	58,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	58,00	Unit	58,00	Unit	100,00
2	1	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	51,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	51,00	Unit	51,00	Unit	100,00
2	1	0	2	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	1,00	Aplikasi	-	Aplikasi	-	Aplikasi	-	Aplikasi	-	1,00	Aplikasi	1,00	Aplikasi	10



2	1	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,00	Buah	-	Buah	1,00	Buah	1,00	Buah	100,00	4,00	Buah	5,00	Buah	10,00	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>136,00</b>	<b>Laporan</b>	<b>-</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,00</b>	<b>Persen</b>	<b>136,00</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24,00	Bulan	-	Bulan	12,00	Bulan	-	Bulan	-	12,00	Bulan	12,00	Bulan	50,00	
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan / Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,00	Bulan	-	Bulan	12,00	Bulan	12,00	Bulan	100,00	12,00	Bulan	24,00	Bulan	10,00	
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24,00	Bulan	-	Bulan	12,00	Bulan	12,00	Bulan	100,00	12,00	Bulan	24,00	Bulan	10,00	
2	1	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	200,00	Persentase	-	Persentase	100,00	Persentase	100,00	Persentase	100,00	100,00	Persentase	200,00	Persentase	10,00	
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	1,00	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	1,00	unit	1,00	unit	10,00	



					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan								
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11,00 unit	- unit	1,00 unit	11,00 unit	1.100,00	10,00 unit	21,00 unit	190,91
2	1	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131,00 unit	- unit	63,00 unit	63,00 unit	100,00	68,00 unit	131,00 unit	100,00
2	1	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28,00 Unit	- Unit	8,00 Unit	8,00 Unit	100,00	20,00 Unit	28,00 Unit	100,00
2	1	8			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Penyelesaian Perizinan Dan Non Perizinan</b>	<b>87% Persen</b>	<b>- Persen</b>	<b>- Persen</b>	<b>- Persen</b>	<b>-</b>	<b>85% Persen</b>	<b>85% Persen</b>	<b>97,70</b>
						<b>Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional</b>	<b>17.355.990.095.316,40 Rupi ah</b>	<b>- Rupi ah</b>	<b>- Rupi ah</b>	<b>- Rupi ah</b>	<b>-</b>	<b>15.053.626.361.275,00 Rupi ah</b>	<b>15.053.626.361.275,00 Rupi ah</b>	<b>86,73</b>
						<b>Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN</b>	<b>15% Persen</b>	<b>- Persen</b>	<b>- Persen</b>	<b>- Persen</b>	<b>-</b>	<b>15,00 Persen</b>	<b>15,00 Persen</b>	<b>100,00</b>
						<b>Jumlah Investor</b>	<b>423 Perusahaan (400) Perusahaan</b>	<b>- Perusahaan</b>	<b>- Perusahaan</b>	<b>- Perusahaan</b>	<b>-</b>	<b>323,00 Perusahaan</b>	<b>323,00 Perusahaan</b>	<b>76</b>



						Berskala Nasional	PMDN dan 23 PMA)												,36		
2	18	02				<b>PROGRAM PENGEMBAN GAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Peningkatan Penanaman Modal (Investor PMDN dan PMA)	17,17	Persen	-	Persen	17,17	Persen	33,90	Persen	197,44	18,32	Persen	52,22	Persen	304,14
2	18	02	20	1		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5,00	Dokumen	-	Dokumen	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00	4,00	Dokumen	5,00	Dokumen	100,00
2	18	02	01	01		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4,00	Dokumen	-	Dokumen	1,00	Dokumen	6,00	Dokumen	600,00	3,00	Dokumen	9,00	Dokumen	225,00
2	18	02	01	02		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50,00	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	50,00	Dokumen	50,00	Dokumen	100,00
2	18	02	02	2		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi</b>	<b>Jumlah Dokumen Kebijakan Peta</b>	<b>3,00</b>	<b>Dokumen</b>	<b>-</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1,00</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1,00</b>	<b>Dokumen</b>	<b>10</b>	<b>2,00</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3,00</b>	<b>Dokumen</b>	<b>10</b>



					<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>Potensi Investasi</b>							<b>0,0 0</b>					<b>0, 00</b>		
2	1	0	2	0	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1,00	Doku men	-	Doku men	-	Doku men	-	1,00	Doku men	1,00	Doku men	10 0, 00		
2	1	0	2	0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2,00	Doku men	-	Doku men	1,00	Doku men	1,00	Doku men	100 ,00	1,00	Doku men	2,00	Doku men	10 0, 00
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Calon Investor (skala menengah dan besar) yang Beraudensi Ke PEMDA</b>	<b>4,00</b>	<b>Inve stor</b>	<b>-</b>	<b>Inve stor</b>	<b>2,00</b>	<b>Inve stor</b>	<b>2,00</b>	<b>Inve stor</b>	<b>10 0,0 0</b>	<b>2,00</b>	<b>Inve stor</b>	<b>4,00</b>	<b>Inve stor</b>	<b>10 0, 00</b>
2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Strategi Promosi Penanaman Modal	4,00	Kali Dgn Strat egi	-	Kali Dgn Strat egi	1,00	Kali Dgn Strat egi	1,00	Kali Dgn Strat egi	10 0,0 0	3,00	Kali Dgn Strat egi	4,00	Kali Dgn Strat egi	10 0, 00
2	1	0	2	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	4,00	Strat egi	-	Strat egi	2,00	Strat egi	1,00	Strat egi	50, 00	2,00	Strat egi	3,00	Strat egi	75 ,0 0
2	1	0	2	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran/Promosi Digital yang di Ikuti	2,00	Kali	-	Kali	1,00	Kali	1,00	Kali	100 ,00	1,00	Kali	2,00	Kali	10 0, 00
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Penyelesaian Permohonan</b>	<b>165,00</b>	<b>Pers en</b>	<b>-</b>	<b>Pers en</b>	<b>80,00</b>	<b>Pers en</b>	<b>80,00</b>	<b>Pers en</b>	<b>10 0,0 0</b>	<b>85,00</b>	<b>Pers en</b>	<b>165,00</b>	<b>Pers en</b>	<b>10 0, 00</b>



2	1	0	2		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non perizinan dibidang Penanaman Modal	16.905,00	Perizinan dan Non Perizinan	-	Perizinan dan Non Perizinan	9.590,00	Perizinan dan Non Perizinan	9.590,00	Perizinan dan Non Perizinan	100,00	7.315,00	Perizinan dan Non Perizinan	16.905,00	Perizinan dan Non Perizinan	100,00
2	1	0	2	0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang di proses	12.800,00	Layanan	-	Layanan	6.400,00	Layanan	10.985,00	Layanan	171,64	6.400,00	Layanan	17.385,00	Layanan	135,82
2	1	0	2	0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	370,00	Pemenuhan Komitmen per proyek	-	Pemenuhan Komitmen per proyek	130,00	Pemenuhan Komitmen per proyek	140,00	Pemenuhan Komitmen per proyek	107,69	240,00	Pemenuhan Komitmen per proyek	380,00	Pemenuhan Komitmen per proyek	102,70
2	1	0	2	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan	Jumlah Laporan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan	1.700,00	Laporan	-	Laporan	850,00	Laporan	874,00	Laporan	102,82	850,00	Laporan	1.724,00	Laporan	101,41





					Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terpadu Perizinan dan Nonperizinan														
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5,00	Kali	-	Kali	-	Kali	-	Kali	-	5,00	Kali	-	Kali	
2	1	0			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai Investasi</b>	15.053.826.361.275,00	Rupiah	-	Rupiah	13.902.444.494.254,20	Rupiah	13.872.858.059.159,00	Rupiah	99,79	15.053.826.361.275,00	Rupiah	28.926.684.420.434,00	Rupiah	192,16
						<b>Tambahan Realisasi Investasi (Tahunan)</b>	1.300.000.000,00	Rupiah	-	Rupiah	1.300.000.000,00	Rupiah	1.121.595.431.926,00	Rupiah	86,28		Rupiah	1.121.595.431.926,00	Rupiah	86,28
						<b>Rasio Penyerapan Tenaga Kerja (Tahunan)</b>	155,00	Orang/Perusahaan/Tahun	-	Orang/Perusahaan/Tahun	155,00	Orang/Perusahaan/Tahun	116,00	Orang/Perusahaan/Tahun	74,84		Orang/Perusahaan/Tahun	116,00	Orang/Perusahaan/Tahun	74,84
						<b>Jumlah Investor</b>	323,00	Perusahaan	-	Perusahaan	273,00	Perusahaan	312,00	Perusahaan	114,29	323,00	Perusahaan	635,00	Perusahaan	196,59
2	1	0	2	0	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Perproyek yang dipantau dan dibina	90,00	Perusahaan	-	Perusahaan	40,00	Perusahaan	40,00	Perusahaan	100,00	50,00	Perusahaan	90,00	Perusahaan	100,00



2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen LKPM (Per Triwulan dan Persemester) (Jumlah Proyek dan profil pelaku usaha hasil pemantauan)	5,00	Dokumen	-	Dokumen	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	100,00	1,00	Dokumen	5,00	Dokumen	100,00
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi/Bimtek, Laporan Kegiatan dan jumlah peserta	14,00	Kali	-	Kali	7,00	Kali	7,00	Kali	100,00	7,00	Kali	14,00	Kali	100,00
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Proyek dan Profil Pelaku Usaha Hasil Pengawasan	36,00	Proyek	-	Proyek	21,00	Proyek	18,00	Proyek	85,71	15,00	Proyek	33,00	Proyek	91,67
2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Jenis Data Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Digital/ Elektronik, Buku/Manual)</b>	<b>4,00</b>	<b>Buku</b>	<b>-</b>	<b>Buku</b>	<b>1,00</b>	<b>Buku</b>	<b>1,00</b>	<b>Buku</b>	<b>100,00</b>	<b>3,00</b>	<b>Buku</b>	<b>4,00</b>	<b>Buku</b>	<b>100,00</b>
2	1	0	2		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>  <b>Jumlah Laporan Pelayanan Informasi/Konsultasi/Pendampingan</b>  <b>(Rekon data</b>	<b>14,00</b>	<b>Laporan</b>	<b>-</b>	<b>Laporan</b>	<b>12,00</b>	<b>Laporan</b>	<b>1,00</b>	<b>Laporan</b>	<b>8,33</b>	<b>2,00</b>	<b>Laporan</b>	<b>3,00</b>	<b>Laporan</b>	<b>21,43</b>



						izin, Rata2 lama penyelesaian Izin, dan Monev izin per semester)															
2	1	0	2	0	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Laporan Pelayanan Informasi/Konsultasi/Pendampingan	14,00	Lapo ran	-	Lapo ran	12,00	Lapo ran	1,00	Lapo ran	8,3 3	2,00	Lapo ran	3,00	Lapo ran	21 ,4 3
<b>III. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</b>																					
						<b>URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2	1	0				Program Penunjang Urusan pemerintah	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang	200,00	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



					Daerah Kabupaten/ Kota	Urusan Pemerintah Daerah									
2	1	0	2		Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Pengaangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200,00	Perse ntase	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA, RENJA, RKA,DPA, dan DPPA	10,00	Doku men	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyususnan Dokumen RKA- SKPD	2,00	Doku men	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,00	Doku men	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2,00	Doku men	-	-	-	-	-	-	-



						Perubahan DPA-SKPD											
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2,00	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,00	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>200,00</b>	<b>Persentase</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48,00	Orang/bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2	1	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,00	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2,00	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>200,00</b>	<b>Persen</b>	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3,00	Paket	-	-	-	-	-	-	-



2	1	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,00	Doku men	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	408,00	Oran g	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	102,00	Oran g	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>200,00</b>	<b>Pers en</b>	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6,00	Paket	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4,00	Paket	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	98,00	Paket	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16,00	Paket	-	-	-	-	-	-	-



2	1	0	2	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10,00	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240,00	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2,00	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>212,00</b>	<b>Unit</b>	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4,00	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	114,00	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80,00	Unit	-	-	-	-	-	-	-





2	1	0	2	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4,00	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10,00	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>72,00</b>	<b>Laporan</b>	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24,00	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24,00	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24,00	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>204,00</b>	<b>Unit</b>	-	-	-	-	-	-	-



2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22,00	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	136,00	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2,00	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2,00	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	1	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40,00	Unit	-	-	-	-	-	-	-



					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Penyelesaian Perizinan Dan Non Perizinan</b>	<b>87%</b>	<b>Persen</b>	-	-	-	-	-	-	-
						<b>Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional</b>	<b>17.355.990.095.316,40</b>	<b>Rupiah</b>	-	-	-	-	-	-	-
						<b>Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN</b>	<b>15%</b>	<b>Persen</b>	-	-	-	-	-	-	-
						<b>Jumlah Investor Berskala Nasional</b>	<b>423 Perusahaan (400 PMDN dan 23 PMA)</b>	<b>Perusahaan</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Penanaman Modal (Investor PMDN dan PMA)</b>	<b>28,88</b>	<b>persentase</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan berusaha di daerah	12,00	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-



2	1	0	2	0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6,00	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	140,00	Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Peta Potensi Investasi	2,00	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2,00	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
							-									
2	1	0			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Calon Investor (skala Menengah dan Besar) yang Beraudensi Ke PEMDA</b>	<b>4,00</b>	<b>Investor</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Jumlah Pelaksanaan Strategi Promosi Penanaman Modal	5,00	Kalidgn 2 Strategi	-	-	-	-	-	-	-	-



					Daerah Kabupaten/Kota												
2	18	03	201	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	4,00	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18	03	201	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6,00	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Penyelesaian Permohonan Perizinan dan Nonperizinan</b>	<b>87,00</b>	<b>Persentase</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18	04	201		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal	14.630,00	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18	04	201	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan	12.800,00	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-



					Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
2	1	0	2	0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	120,00	Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1.700,00	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	40,00	Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2	1	0			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai Investasi PMDN and PMA</b>	17.355.990.095.316,4	<b>Rupiah</b>	-	-	-	-	-	-	-
						<b>Jumlah Investor PMDN dan PMA</b>	423 Perusaha an (400 PMDN dan 23 PMA)	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Perproyek yang Dipantau, Dibina dan Diawasi	100,00		-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	720,00	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	30,00	Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Jenis Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (digital/elektronik,)</b>	23,00	<b>Digital</b>	-	-	-	-	-	-	-



						Jumlah Jenis Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Buku/ Manual)	104,00	Buku	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi/Konsultasi/Pedampungan	6.512,00	Dokumen	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6.512,00	Dokumen	-	-	-	-	-	-

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2019 – 2024 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya tidak bisa melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Sehingga banyak program kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan





Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya tidak dapat direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan pencapaian kinerja terhadap Renstra SKPD tidak maksimal.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022 (TWI)	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-3)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)	(12)	(12)	(13)
1	Nilai Sakip SKPD			A (81,24)	A (81,05)	A (80,86)	A (80,86)	A (80,15)	-	-	A (81,05)	A (80,86)	
2	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik (Mempan)			B (3,6)	B (3,7)	B (3,8)	B (3,8)	B (3,42)	-	-	B (3,7)	B (3,8)	
3	Nilai kinerja PTSP (BKPM)			B (70)	B (79)	SB (80)	SB (80)	-	SB (85,013)	-	B (79)	SB (80)	
4	Nilai kinerja pelayanan public (ORI)			Hijau (89)	Hijau (90)	Hijau (91)	Hijau (91)	-	Hijau (98,14)	-	Hijau (90)	Hijau (91)	
5	Nilai Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Terkait Penyelenggaraan Perizinan			Level 4 (4,0)	Level 4 (4,2)	Level 4 (4,3)	Level 4 (4,3)	-	-	-	Level 4 (4,2)	Level 4 (4,3)	



	dan Nonperizinan											
6	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)		13.902.444,49	15.053.626,36	16.204.808,23	17.355.990,10	12.751.262.627.233,50	13.786.624.019.160,50		15.053.626.361.275,00	16.204.808.228.295,70	
7	Tambahan nilai realisasi investasi per tahun (tahun berjalan)		1.300.000.000.000,00	-	-	-	1.539.298.280.000,00	1.035.361.391.926,97	-	-	-	
	- PMDN		715.000.000.000,00	-	-	-	451.569.800.000,00	881.153.200.000,00	-	-	-	
	- PMA		585.000.000.000,00	-	-	-	1.087.728.480.000,00	154.208.191.926,97	-	-	-	
8	Jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA)		273	323	373	373	196	233	308	323	373	
	- PMDN		250	300	350	350	179	210	278	300	350	
	- PMA		23	23	23	23	17	23	30	23	23	
9	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	19,00%	19,00%	10,32	15,00%	15,00%	
10	Rasio daya serap tenaga kerja per tahun											
	- Akumulasi tahunan		155 org/tahun/per usahaan	-	-	-	-	149 org/tahun/per usahaan	-	-	-	
	- Tahun berjalan		15 org/tahun/per usahaan	-	-	-	-	10 org/tahun/per usahaan	-	-	-	
11	Persentase Jumlah perizinan yang selesai		80%	85%	85%	87%	89,83%	89,33%	69,49%	85%	85%	



### 2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, implikasi rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis bagi pelayanan perangkat daerah, maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya akses yang diberikan secara luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan serta belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan.
2. Menurunnya persentase peningkatan investasi setiap tahunnya.
3. Aplikasi perizinan melalui Online Single Submission Rirks Base Aproach (OSS RBA) belum optimal.
4. Pelayanan Perizinan berubah menggunakan aplikasi digital yaitu OSS RBA, Sicantik cloud dan SIMBG.
5. Masih rendahnya Realisasi Nilai Tambah investasi (LKPM) per Tahun.
6. Masyarakat belum semua mengetahui dan memahami pelayanan perizinan melalui aplikasi digital.



2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kabupaten Kubu Raya		100%	8.637.611.291	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kabupaten Kubu Raya		100%	7.637.611.291	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Kubu Raya	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.321.124.641	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Kubu Raya	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.524.950.307	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kubu Raya	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	57.285.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kubu Raya	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	57.285.600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	26.270.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	26.270.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	23.335.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	23.335.200	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.680.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.680.000	



	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.994.308.487</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.962.745.961</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	24 Orang / Bulan	3.983.378.317	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	24 Orang / Bulan	3.951.815.791
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.490.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.490.800
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.439.370	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.439.370
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>162.450.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>118.830.600</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	53.550.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	8.400.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	12.042.120
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	204 Orang	24.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	204 Orang	30.288.480
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51 Orang	76.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51 Orang	76.500.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>801.900.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>671.257.560</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	210.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	123.403.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	235.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	266.217.920



	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	95.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	88.352.020	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	16.900.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	7.416.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	245.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92 Laporan	144.075.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	41.793.120	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kabupat en Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>77 Unit</b>	<b>518.340.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kabupat en Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>15 Unit</b>	<b>83.803.200</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	73.340.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	
	Pengadaan Mebel	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	145.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	50.200.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	33.603.200	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupat en Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>545.520.208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupat en Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>506.717.040</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	280.520.208	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	161.100.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	265.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	345.617.040	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupat en Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>101 Unit</b>	<b>241.320.346</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupat en Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>77 Unit</b>	<b>124.310.346</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.552.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kabupat en Kubu Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.552.600	



	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	38.477.746	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	38.477.746	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	48.560.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	32.050.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20.230.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20.230.000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Persentase Penyelesaian Perizinan Dan Non Perizinan</b>	<b>85%</b>	<b>2.316.486.650</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Persentase Penyelesaian Perizinan Dan Non Perizinan</b>	<b>85%</b>	<b>2.112.660.984</b>	
			<b>Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional</b>	<b>16.204.808.228.295,70</b>				<b>Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional</b>	<b>16.204.808.228.295,70</b>		
			<b>Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN</b>	<b>15%</b>				<b>Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN</b>	<b>15%</b>		
			<b>Jumlah Investor Berskala Nasional</b>	<b>373 Perusahaan (350 PMDN dan 23 PMA)</b>				<b>Jumlah Investor Berskala Nasional</b>	<b>373 Perusahaan (350 PMDN dan 23 PMA)</b>		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Persentase Peningkatan Penanaman Modal</b>	<b>15%</b>	<b>265.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Persentase Peningkatan Penanaman Modal</b>	<b>15%</b>	<b>315.933.400</b>	
	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>165.000.000</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>124.889.000</b>	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam	3 Dokumen	100.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	75.879.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha	70 Kegiatan Usaha	65.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan	70 Kegiatan Usaha	49.010.000	





	Kemudahan Penanaman Modal					Kemudahan Penanaman Modal		Kemudahan Berusaha di Daerah			
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Dokumen Kebijakan Peta Potensi Investasi</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Dokumen Kebijakan Peta Potensi Investasi</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>191.044.400</b>	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang	1 Dokumen	100.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	191.044.400	
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Calon Investor yang Beraudensi Ke PEMDA</b>	<b>2 Investor</b>	<b>543.000.000</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Calon Investor yang Beraudensi Ke PEMDA</b>	<b>2 Investor</b>	<b>389.558.400</b>	
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Strategi Promosi Penanaman Modal</b>	<b>3 Kali dengan 2 Strategi</b>	<b>543.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Strategi Promosi Penanaman Modal</b>	<b>3 Kali dengan 2 Strategi</b>	<b>389.558.400</b>	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur	2 Dokumen	143.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	31.032.400	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	3 Dokumen	400.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	358.526.000	
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Persentase Penyelesaian Permohonan Perizinan dan Nonperizinan</b>	<b>85%</b>	<b>771.921.450</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Persentase Penyelesaian Permohonan Perizinan dan Nonperizinan</b>	<b>85%</b>	<b>708.286.220</b>	
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal</b>	<b>7315 Perizinan dan Nonperizinan</b>	<b>771.921.450</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal</b>	<b>7315 Perizinan dan Nonperizinan</b>	<b>708.286.220</b>	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6400 Pelaku Usaha	571.605.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6400 Pelaku Usaha	522.639.000	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen	60 Kegiatan Usaha	132.500.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen	60 Kegiatan Usaha	102.750.000	



			Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal					Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	725 Orang	34.482.570	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	725 Orang	46.117.320
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	20 Kegiatan Usaha	33.333.880	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	20 Kegiatan Usaha	36.779.900
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODA</b>	Kabupaten Kubu Raya	Nilai Investasi, Jumlah Investor, Nilai Realisasi Investasi PMDN	16.204.808.228.295,70	503.492.000	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODA</b>	Kabupaten Kubu Raya	Nilai Investasi, Jumlah Investor, Nilai Realisasi Investasi PMDN	16.204.808.228.295,70	498.874.764
15%				15%						
373 Perusahaan (350 PMDN dan 23 PMA)				373 Perusahaan (350 PMDN dan 23 PMA)						
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Perusahaan Perproyek yang Dipantau, Dibina dan Diawasi	50 Perusahaan	503.492.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Perusahaan Perproyek yang Dipantau, Dibina dan Diawasi	50 Perusahaan	498.874.764
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	360 Pelaku Usaha	355.570.640	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	8 Kegiatan Usaha	327.133.600
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	8 Kegiatan Usaha				Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	232 Pelaku Usaha	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	25 Kegiatan Usaha	147.921.360	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	15 Kegiatan Usaha	171.741.164



	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Jenis Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (digital/elektronik, Buku/Manual)</b>	<b>10 Informasi Digital dan 40 Buku/Manual</b>	<b>233.073.200</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Jenis Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (digital/elektronik, Buku/Manual)</b>	<b>10 Informasi Digital dan 40 Buku/Manual</b>	<b>200.008.200</b>	
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>233.073.200</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>200.008.200</b>	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	233.073.200	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	200.008.200	



### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Promosi investasi merupakan bagian penting dari roadmap strategi investasi BKPM. Untuk tujuan tersebut, perlu melalui beberapa tahapan, sebagai berikut :

1. Fokus dalam jangka pendek adalah meningkatkan efisiensi investasi di Indonesia. Hal ini mencakup optimalisasi sumber daya alam sebagai katalisator yang dapat menciptakan momentum yang diperlukan untuk melaksanakan program-program menuju pembangunan ekonomi yang lebih besar.
2. Penyaluran investasi ke arah kebutuhan infrastruktur keras maupun lunak. Yang dimaksud dengan infrastruktur keras meliputi jalan raya, bandara, pelabuhan dan kapasitas pembangkit listrik, sedangkan infrastruktur lunak mencakup antara lain pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Membangun landasan untuk industrialisasi. Hal ini menuntut adanya investasi di bidang pendidikan secara terus menerus untuk menciptakan angkatan kerja yang berpendidikan dan berkemampuan tinggi. Tuntutan selanjutnya adalah penghapusan ketidakpastian dalam kebijakan, termasuk pelaksanaan prakarsa PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan SPIPISE atau NSWi (National Single Window for Investment) secara maksimum yang dirancang untuk menanggulangi masalah ini. Ketentuan hukum tentang insentif fiskal dan non-fiskal juga perlu diperhatikan untuk menunjang upaya industrialisasi skala besar ini.
4. Mendukung pembentukan ekonomi berbasis pengetahuan dengan mengembangkan lebih lanjut angkatan kerja berpendidikan yang dapat bersaing secara global. Pada tahap ini, BKPM akan berupaya untuk terus menguatkan perannya sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestik.



### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dalam proses penyelenggaraan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan untuk periode 2019 – 2024, mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal atau investasi.

Adapun sasaran dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. Meningkatnya investasi PMDN dan PMA;
3. Meningkatnya jumlah investor PMDN dan PMA;
4. Meningkatnya nilai realisasi investasi;
5. Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja.

Tabel 3.3  
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun 2023
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Nilai Sakip SKPD	A
					80,86
				Nilai penyelenggaraan pelayanan public (Mempan)	B
					3,8
			Nilai kinerja PTSP (BKPM)	SB	
				80	
			Nilai kinerja pelayanan public (ORI)	Hijau	
				91	
2.	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah nilai investasi berskala nasional (Akumulasi PMDN dan PMA)	16.204.808.228.295,70
			Meningkatnya Jumlah PMDN dan PMA	Jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA) Tahun Berjalan	373
				- PMDN	350
				- PMA	23
			Meningkatnya/menurunnya Realisasi Investasi PMDN	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN Tahun Berjalan	15%
Meningkatnya Realisasi Penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan	85%			



3.3. Program dan Kegiatan

Tabel 3.3  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Kubu Raya

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catat an Penti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuha n Dana / Pagu Indikatif		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuha n Dana / Pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kabup aten Kubu Raya	100%	7.637.61 1.291	APB D		100%	7.893.89 2.448
2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabup aten Kubu Raya	100%	5.524.95 0.307	APB D		100%	7.893.89 2.448
2	1	1	2.	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabup aten Kubu Raya	100%	57.285.6 00	APB D		100%	57.285.6 00
2	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupa ten Kubu Raya	5 Dokumen	26.270.40 0	APB D		6 Dokumen	26.270.40 0



2	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kubu Raya	6 Laporan	23.335.200	APB D		6 Laporan (LKPJ/LPPD, Laporan Kinerja SKPD Tahunan dan Triwulan)	23.335.200
2	1	1	2.0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kubu Raya	4 Laporan	7.680.000	APB D		4 Laporan (Evaluasi Renja pertriwulan)	7.680.000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>100%</b>	<b>3.962.745.961</b>	<b>APB D</b>			<b>4.532.183.728</b>
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kubu Raya	24 Orang / Bulan	3.951.815.791	APB D		24 Orang/Bulan	4.521.253.558
2	1	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kubu Raya	1 Laporan	8.490.800	APB D		1 Laporan Keuangan Tahunan	8.490.800
2	1	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Kubu Raya	1 Laporan	2.439.370	APB D		1 Laporan Keuangan Semesteran	2.439.370





<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>100%</b>	<b>118.830.600</b>	<b>APB D</b>		<b>100%</b>	<b>337.450.000</b>
2	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	12.042.120	APB D		1 Dokumen	50.000.000
2	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kubu Raya	204 Orang	30.288.480	APB D		204 Orang	31.000.000
2	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kubu Raya	51 Orang	76.500.000	APB D		51 Orang	196.500.000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>100%</b>	<b>671.257.560</b>	<b>APB D</b>		<b>100%</b>	<b>921.293.120</b>
2	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Kubu Raya	3 Paket	123.403.500	APB D		3 Paket (9 Unit Laptop, 9 unit Printer, dan 9 Hardisk Eksternal)	225.000.000
2	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Kubu Raya	50 Paket	266.217.920	APB D		3 Paket (Alat Tulis Kantor, Cetak dan Makan Minum)	275.000.000
2	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Kubu Raya	8 Paket	88.352.020	APB D		1 Paket (cetak umum, cetak 1000 stiker SLF, cetak 500 buku SKBG)	110.000.000
2	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kabupaten	3 Dokumen	7.416.000	APB D		1 Dokumen (2 Surat Kabar, 1 Majalah, 100	18.000.000



						Undangan yang Disediakan	Kubu Raya					Buku perpustakaan)	
2	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kubu Raya	92 Laporan	144.075.00	APB D		120 Laporan (80 Laporan perjalanan dinas Biasa, 40 Laporan Perjalanan Dinas Dalam Kota)	250.000.00
2	1	1	2.0	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	41.793.120	APB D		1 Dokumen	41.793.120
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>100%</b>	<b>83.803.200</b>	<b>APB D</b>		<b>100%</b>	
2	1	1	2.0	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Kubu Raya	13 Unit	50.200.000	APB D		30 Unit	155.000.000
2	1	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Kubu Raya	2 Unit	33.603.200	APB D		40 Unit	300.000.000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>506.717.040</b>	<b>APB D</b>		<b>100%</b>	
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Kubu Raya	12 Laporan	161.100.000	APB D		12 Laporan (biaya listrik, air, tlp bulan)	475.000.000



2	1	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Kubu Raya	12 Laporan	345.617.040	APB D		12 Laporan	550.000.000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>100%</b>	<b>124.310.346</b>	<b>APB D</b>		<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Kubu Raya	1 Unit	33.552.600	APB D		1 Unit Kendaraan Roda 4	35.000.000
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Kubu Raya	11 Unit	38.477.746	APB D		18 Unit (1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 17 Unit Kendaraan Roda 2)	42.500.000
2	1	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Kubu Raya	45 Unit	32.050.000	APB D		99 Unit (54 Unit PC/Notebook dan 45 Unit Printer)	75.000.000
2	1	1	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Kubu Raya	20 Unit	20.230.000	APB D		30 Unit (29 Unit AC dan 1 Unit Genset)	30.000.000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Penyelesaian Perizinan Dan Non Perizinan</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>85%</b>	<b>2.112.660.984</b>			<b>85%</b>	



						<b>Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional</b>		<b>16.204.808.228.295,70</b>	APB D		<b>16.204.808.228.295,70</b>		
						<b>Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN</b>		<b>15%</b>	APB D		<b>15%</b>		
						<b>Jumlah Investor Berskala Nasional</b>		<b>373 Perusahaan (350 PMDN dan 23 PMA)</b>	APB D		<b>373 Perusahaan (350 PMDN dan 23 PMA)</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Penanaman Modal</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>15%</b>	<b>315.933.400</b>	<b>APB D</b>		<b>15%</b>	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>124.889.000</b>	<b>APB D</b>		<b>2 Dokumen</b>	
2	1	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Kubu Raya	3 Dokumen	75.879.000	APB D		3 Dokumen	100.000.000
2	1	2	2.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kabupaten Kubu Raya	70 Kegiatan Usaha	49.010.000	APB D		70 Kegiatan Usaha	65.000.000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Kebijakan Peta Potensi Investasi</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>191.044.400</b>	<b>APB D</b>		<b>1 Dokumen</b>	
2	1	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang	Kabupaten	1 Dokumen	191.044.400	APB D		1 Dokumen	100.000.000



					Usaha Kabupaten/Kota	Usaha Kabupaten/Kota	Kubu Raya						
2	1	3			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Calon Investor yang Beraudensi Ke PEMDA</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>2 Investor</b>	<b>389.558.400</b>	<b>APB D</b>		<b>2 Investor</b>	
2	1	3	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Strategi Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>3 Kali dengan 2 Strategi</b>	<b>389.558.400</b>	<b>APB D</b>		<b>3 Kali dengan 2 Strategi</b>	
2	1	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kubu Raya	2 Dokumen	31.032.400	APB D		2 Dokumen	150.000.000
2	1	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kabupaten Kubu Raya	2 Dokumen	358.526.000	APB D		3 Dokumen	400.000.000
2	1	4			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Penyelesaian Permohonan Perizinan dan Nonperizinan</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>85%</b>	<b>708.286.220</b>	<b>APB D</b>		<b>85%</b>	
2	1	4	2.01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>7315 Perizinan dan Nonperizinan</b>	<b>708.286.220</b>			<b>7315 Perizinan dan Nonperizinan</b>	
2	1	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	Kabupaten Kubu Raya	6400 Pelaku Usaha	522.639.000	APB D		6400 Pelaku Usaha	628.765.500



					Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Kubu Raya	60 Kegiatan Usaha	102.750.000	APB D		60 Kegiatan Usaha	145.750.000
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Kubu Raya	725 Orang	46.117.320	APB D		850 Orang	35.000.000
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Kubu Raya	20 Kegiatan Usaha	36.779.900	APB D		20 Kegiatan Usaha	85.000.000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODA</b>	<b>Nilai Investasi, Jumlah Investor, Nilai Realisasi Investasi PMDN</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>16.204.808.228.295,70</b>	<b>498.874.764</b>	<b>APB D</b>		<b>16.204.808.228.295,70</b>	<b>632.723.960</b>
								<b>15%</b>				<b>15%</b>	
								<b>373 Perusahaan (350 PMDN dan 23 PMA)</b>				<b>373 Perusahaan (350 PMDN dan 23 PMA)</b>	



2	1	5	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan Perproyek yang Dipantau, Dibina dan Diawasi</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>50 Perusahaan</b>	<b>498.874.764</b>	<b>APB D/ APB N</b>		<b>50 Perusahaan</b>	<b>632.723.960</b>
2	1	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Kubu Raya	8 Kegiatan Usaha	327.133.600	APB D/ APB N		360 Pelaku Usaha	401.360.960
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal		232 Pelaku Usaha				8 Kegiatan usaha	
2	1	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kabupaten Kubu Raya	15 Kegiatan Usaha	171.741.164	APB D/ APB N		25 Kegiatan Usaha	231.363.000
2	1	6			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Jenis Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (digital/elektronik, Buku/Manual)</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>10 Informasi Digital dan 40 Buku/Manual</b>	<b>200.008.200</b>	<b>APB D</b>		<b>10 Informasi Digital dan 40 Buku/Manual</b>	<b>220.080.520</b>
2	1	6	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>	<b>Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>200.008.200</b>	<b>APB D</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>220.080.520</b>



						<b>yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</b>							
2	1	6	2.0	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kabupaten Kubu Raya	2 Dokumen	200.008.200	APB D		1 Dokumen	220.080.520



**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Tahun 2023

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

## Alokasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2023 Kabupaten Kubu Raya

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>7.637.611.291</b>	<b>APBD</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.524.950.307</b>	<b>APBD</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>57.285.600</b>	<b>APBD</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.270.400	APBD
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.335.200	APBD
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.680.000	APBD
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.962.745.961</b>	<b>APBD</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.951.815.791	APBD
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.490.800	APBD
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.439.370	APBD
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>118.830.600</b>	<b>APBD</b>
1.3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.042.120	APBD
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.288.480	APBD
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76.500.000	APBD
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>671.257.560</b>	<b>APBD</b>
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.403.500	APBD
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	266.217.920	APBD
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.352.020	APBD
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.416.000	APBD
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.075.000	APBD
1.4.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	41.793.120	APBD
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>83.803.200</b>	<b>APBD</b>
1.5.1	Pengadaan Mebel	50.200.000	APBD



1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.603.200	APBD
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>506.717.040</b>	<b>APBD</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.100.000	APBD
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	345.617.040	APBD
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>124.310.346</b>	<b>APBD</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.552.600	APBD
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.477.746	APBD
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.050.000	APBD
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.230.000	APBD
<b>II</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>2.112.660.984</b>	<b>APBD</b>
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>315.933.400</b>	<b>APBD</b>
<b>2.1</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>124.889.000</b>	<b>APBD</b>
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	75.879.000	APBD
2.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	49.010.000	APBD
<b>2.2</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>191.044.400</b>	<b>APBD</b>
2.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota	191.044.400	APBD
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>389.558.400</b>	<b>APBD</b>
<b>3.1</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>389.558.400</b>	<b>APBD</b>
3.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	31.032.400	APBD
3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	358.526.000	APBD
<b>4</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>708.286.220</b>	<b>APBD</b>
<b>4.1</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>708.286.220</b>	<b>APBD</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</b>	<b>708.286.220</b>	<b>APBD</b>
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	522.639.000	APBD
4.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	102.750.000	APBD
4.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	46.117.320	APBD
4.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	36.779.900	APBD



<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODA</b>	<b>498.874.764</b>	<b>APBD/ APBN</b>
<b>5.1</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>498.874.764</b>	<b>APBD/ APBN</b>
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	327.133.600	APBD/ APBN
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	171.741.164	APBD/ APBN
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>200.008.200</b>	<b>APBD</b>
<b>6.1</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>200.008.200</b>	<b>APBD</b>
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200.008.200	APBD



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang Penanaman Modal dan Perizinan guna meningkatkan dan mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara cepat, mudah, transparan, tepat waktu.

Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024. Terkait dengan hal tersebut maka dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada :

1. Seluruh Aparatur DPMPTSP berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023 dengan penuh tanggungjawab (akuntabel) dan transparansi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Antara Rencana Strategis dengan rencana Kerja harus konsisten dan inovatif sehingga tugas pokok dan fungsi BPMPT dapat berjalan dengan baik guna mencapai Visi, Misi dan Tujuannya.
3. Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan, PPTK, PPK harus melakukan pengawasan internal secara baik dan benar sehingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan, efektif dan efisien.
4. Rencana kerja Tahun 2023 ini merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan kinerja tahunan sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih.



5. Apabila tidak tersedia penganggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan, maka wajib di prioritaskan pada program dan kegiatan yang mendesak untuk melaksanakan urusan wajib Penanaman Modal termasuk pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) didalamnya.

Sungai Raya, 14 Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kubu Raya

  
MARIA AGUSTINA SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710816 199803 2 002